

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1. Implementasi *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

Analisis implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dianalisis menggunakan delapan fenomena, yaitu efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, transparan, interoperabilitas, dan keamanan sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun hasil penelitian mengenai implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya baik. Hal ini terlihat dari upaya peningkatan pelayanan publik melalui integrasi data, penyederhanaan proses administratif, dan kemudahan akses bagi

masyarakat yang telah memberikan dampak positif. Namun, masih terdapat ulasan pengguna yang mengungkapkan pengalaman negatif terhadap aplikasi yang dikembangkan, menunjukkan bahwa implementasi ini memerlukan perbaikan lebih lanjut.

2. Keterpaduan

Implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sudah menunjukkan hasil yang terpadu. Upaya integrasi data telah dilakukan melalui penggunaan jaringan berbasis fiber optik dan jaringan *wireless*, khususnya di tingkat OPD, area publik, dan beberapa desa/kelurahan.

3. Kestinambungan

Kestinambungan dalam implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya terjamin. Meskipun telah dilakukan pengembangan regulasi formal, pembaruan sistem berbasis kebutuhan masyarakat, dan peningkatan fitur layanan, ketiadaan rencana induk SPBE yang terintegrasi menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan strategis yang lebih komprehensif untuk mendukung kestinambungan program di masa depan.

4. Efisiensi

Efisiensi dalam implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sudah baik. Hal itu ditunjukkan dari pengurangan biaya operasional, waktu, dan tenaga bagi masyarakat

maupun pemerintah dengan layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administratif dari mana saja.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari pembagian tugas dan tanggung jawab yang sudah jelas antar bidang sesuai dengan tupoksi, yang mendukung pelaksanaan SPBE secara terstruktur. Namun, pengawasan dan pelaporan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, seperti auditor bersertifikasi dan pengawasan yang masih bersifat internal.

6. Transparansi

Implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sudah transparan. Keterbukaan informasi publik telah diwujudkan melalui berbagai platform digital, seperti website, media sosial, dan aplikasi. Selain itu, mekanisme masukan dari masyarakat telah tersedia melalui WhatsApp Gateway (WAGE), memungkinkan masyarakat memberikan saran atau keluhan secara langsung.

7. Interoperabilitas

Interoperabilitas dalam implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya baik. Pemanfaatan API, penerapan standar e-GIF, dan integrasi sejumlah aplikasi lokal dengan sistem pusat, seperti layanan kesehatan, pengaduan

publik, dan kepegawaian, menunjukkan upaya interoperabilitas. Namun, belum seluruh sistem elektronik dapat terintegrasi secara optimal, terutama untuk aplikasi milik instansi vertikal yang memerlukan izin khusus dan standarisasi yang belum merata di setiap OPD.

8. Keamanan

Implementasi prinsip keamanan dalam *e-government* di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya aman. Meski telah mencakup pengamanan teknis, seperti enkripsi SSL, *firewall*, WAF, dan SIEM, serta penggunaan autentikasi, tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal sertifikasi ISO 27001, keberadaan Security Operation Center (SOC), serta kebijakan privasi yang jelas untuk setiap aplikasi yang dikembangkan.

4.1.2. Faktor yang Memengaruhi Implementasi *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, ditemukan hal yang memengaruhi dalam implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Adapun hal-hal yang yang memengaruhi dalam implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi *e-government*, baik secara internal antara unit kerja melalui rapat koordinasi dan apel pagi, maupun secara eksternal melalui media sosial, website, dan acara

publik. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan penggunaan berbagai kanal komunikasi memastikan pemahaman yang seragam dan penyebaran informasi yang tepat kepada masyarakat, yang berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan kebijakan *e-government*.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi *e-government* di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung, mencakup dana, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Meskipun anggaran yang ada hampir terserap sepenuhnya, dana yang tersedia masih belum cukup untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih canggih. Jumlah infrastruktur teknologi berupa fiber optik masih terbatas dan untuk standar keamanan belum memenuhi standar internasional seperti ISO 27001. Sementara jumlah dan kompetensi SDM juga belum memadai untuk mendukung pelaksanaan *e-government* secara optimal.

3. Disposisi

Disposisi dalam implementasi *e-government* di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung menunjukkan dukungan yang kuat dari pegawai dan pimpinan, dengan kepatuhan terhadap aturan yang didorong oleh sistem insentif dan sanksi administratif. Meskipun demikian, hambatan eksternal berupa ego sektoral di beberapa perangkat daerah lain sering mengganggu koordinasi dalam berbagi data dan akses sistem, sehingga menghambat tercapainya tujuan utama *e-government*, seperti integrasi data dan efisiensi pelayanan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung telah mendukung implementasi *e-government* dengan baik, karena pembagian tugas dan tanggung jawab antarbidang telah dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing. SOP yang jelas dan terstruktur juga memastikan efisiensi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan *e-government*.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, maka untuk memaksimalkan implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Terkait permasalahan internal yang ada dalam fenomena efektivitas, kesinambungan, akuntabilitas, interoperabilitas, keamanan, dan sumber daya, disarankan agar Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung segera menyusun dan mengimplementasikan rencana induk SPBE pemerintah daerah yang terintegrasi dan terarah. Rencana induk SPBE pemerintah daerah ini mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan integrasi data antar OPD, serta pengembangan kebijakan keamanan yang lebih komprehensif. Rencana ini harus mencakup pembaruan sistem, standarisasi yang merata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan mekanisme pengawasan dan audit TIK agar dapat menjamin keberlanjutan, efisiensi, dan keamanan dalam pelayanan publik berbasis elektronik.

2. Terkait permasalahan eksternal yang ada dalam fenomena disposisi, yaitu adanya ego-sektoral antar organisasi perangkat daerah, disarankan agar Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dengan mengadakan forum rutin untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya berbagi data dan akses sistem.